

DAFTAR ISI

Bab I	Ringkasan Eksekutif	Hal 1
Bab II	Tentang OJK	Hal 7
Bab III	Makroekonomi dan Sektor Jasa Keuangan	Hal 15
Bab IV	Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OJK	Hal 27
Bab V	Perencanaan Straregis 2014	Hal 37
Bab VI	Capaian Sasaran Strategis OJK 2014	Hal 43
Bab VII	Pengawasan Terintegrasi	Hal 53
Bab VIII	Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan	Hal 57
Bab IX	Tata Kelola dan Manajemen Strategis	Hal 61
Bab X	Arah Strategis OJK 2015	Hal 71

Halaman ini dengan sengaja dikosongkan

I. RINGKASAN EKSEKUTIF



Halaman ini dengan sengaja dikosongkan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan perlindunganNya sehingga OJK dapat menyusuri perjalanan di tahun keduanya dengan baik. Proses transisi peralihan pengawasan perbankan dan dimulainya pungutan OJK terhadap Industri Jasa Keuangan berjalan relatif lancar tanpa adanya gejolak yang berarti. Di tahun ini, OJK juga mulai mengembangkan pelayanannya kepada masyarakat di 6 Kantor Regional dan 29 Kantor OJK di seluruh Indonesia.

Perekonomian global melanjutkan pemulihan dengan laju yang pelan. Perekonomian Amerika Serikat yang membaik menjadi penopang pertumbuhan global. Di sisi lain, Uni Eropa dan Jepang masih menghadapi berbagai tantangan sehingga pemulihan berjalan lambat dan perekonomian negara-negara berkembang menunjukkan tren perlambatan yang diikuti dengan menurunnya harga komoditas di pasar dunia.

Sampai dengan Triwulan IV-2014 Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,01%. Sementara inflasi mengalami penurunan menjadi 4,53% pada triwulan III-2014 dan kembali mengalami peningkatan pada Desember 2014. Inflasi Desember mencapai 2,46% (mtm) atau secara tahunan sebesar mencapai 8,36%. Tingginya tekanan inflasi terjadi pada kelompok *administered prices* yang bersumber dari kenaikan harga BBM bersubsidi, penyesuaian tarif tenaga listrik untuk kelompok rumah tangga dan industri, kenaikan harga LPG 12 kg, dan penyesuaian tarif angkutan udara. OJK mengharapkan inflasi dapat lebih terkendali lagi pada awal tahun mendatang.

Pergerakan nilai tukar rupiah, pasar saham dan pasar Surat Berharga Negara (SBN) cukup berfluktuasi mengikuti dinamika perekonomian global maupun domestik. Sentimen global antara lain bersumber dari rencana The Fed menaikkan *Fed Funds Rate* lebih cepat dari perkiraan, berlanjutnya indikasi perlambatan perekonomian Tiongkok dan gejolak di Ukraina dan Timur Tengah. Sementara dari domestik, sentimen pasar dipengaruhi oleh rencana kenaikan BBM dan respons pelaku pasar terhadap dinamika politik dalam negeri, khususnya terkait Undang-Undang Pilkada.

Secara umum kondisi industri keuangan domestik terjaga baik, dengan stabilitas yang memadai. Perlambatan pertumbuhan kredit di industri perbankan maupun usaha pembiayaan sejalan dengan proses penyesuaian dalam perekonomian



domestik. Risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko pasar pada lembaga jasa keuangan secara umum berada pada level yang relatif rendah.

OJK telah mengeluarkan 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) untuk mengatur sektor jasa keuangan selama 2014. POJK ini meliputi 7 peraturan di sektor perbankan, 15 peraturan di sektor pasar modal, 14 peraturan di sektor industri keuangan non bank, 1 peraturan tentang edukasi dan perlindungan konsumen dan 2 peraturan tentang pungutan di industri jasa keuangan.

OJK terus melengkapi sistem perlindungan konsumennya melalui *Integrated Financial Customer Care (IFCC)* yang memiliki fasilitas *trackable* dan *traceable*. IFCC OJK telah memberikan 30.386 layanan kepada konsumen dan masyarakat yang terdiri dari penerimaan informasi sebanyak 3.975 dengan tingkat penyelesaian 91%, pemberian informasi sebanyak 23.368 dengan tingkat penyelesaian 93% dan pengaduan sebanyak 3.043 dengan tingkat penyelesaian 67%. OJK juga terus melakukan peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui penyusunan pengayaan kurikulum sekolah untuk tingkat SMA, Layanan Keuangan Mikro, *Outreach Program*, Pasar Keuangan Rakyat, SiMOLEK dan Kompetensi Inklusi Keuangan (Koinku). OJK telah mengeluarkan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI) dan terus mendorong *market deepening* di sektor pasar modal.

Salah satu amanat UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu mengatur tentang pengawasan terintegrasi. Dalam rangka itu OJK mengeluarkan peraturan yang terkait dengan Pengawasan Terintegrasi yaitu penerapan manajemen risiko bagi Konglomerasi Keuangan, penerapan tata kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan pedoman pelaksanaan forum panel pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap Konglomerasi Keuangan.

OJK terus melengkapi sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) dengan berbagai aplikasi untuk mendukung pengelolaan kinerja. Berdasarkan itu pula dapat terlihat adanya peningkatan kinerja dan penyerapan anggaran yang signifikan daripada tahun sebelumnya. Dalam rangka memperkuat sumber daya manusia, OJK meluncurkan OJK Institute sebagai tempat yang mendukung pengembangan pengetahuan karyawan serta pengembangan 24 aplikasi sistem informasi untuk mendukung pengawasan sektor jasa keuangan.

OJK terus mengembangkan berbagai simulasi dan uji ketahanan dalam rangka meningkatkan stabilitas sistem keuangan. OJK juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) baik pada level teknis, deputi hingga rapat anggota FKSSK (*high level meeting*). FKSSK juga telah menyelenggarakan simulasi mini penanganan krisis yang bertujuan untuk menguji efektivitas koordinasi antar-institusi dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis di sistem keuangan domestik, serta menguji efektivitas Protokol Manajemen Krisis (PMK) nasional maupun PMK internal masing-masing institusi.

Dalam rangka mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, berkelanjutan dan stabil, OJK telah melakukan 17 penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian dan Lembaga di dalam negeri, 5 penandatanganan Nota Kesepahaman dengan pihak terkait di luar negeri dan menjadi anggota dari 5 organisasi keuangan internasional.

OJK akan terus berupaya memperbaiki kinerjanya agar fungsi dan tugas OJK dapat dilakukan dengan baik dan keberadaan OJK lebih dirasakan oleh masyarakat luas. OJK juga selalu mengharapkan dukungan dari berbagai pihak terutama Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Bank Indonesia dalam mewujudkan industri keuangan nasional yang stabil, kontributif dan inklusif.

**KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN**

MULIAMAN D. HADAD, Ph.D



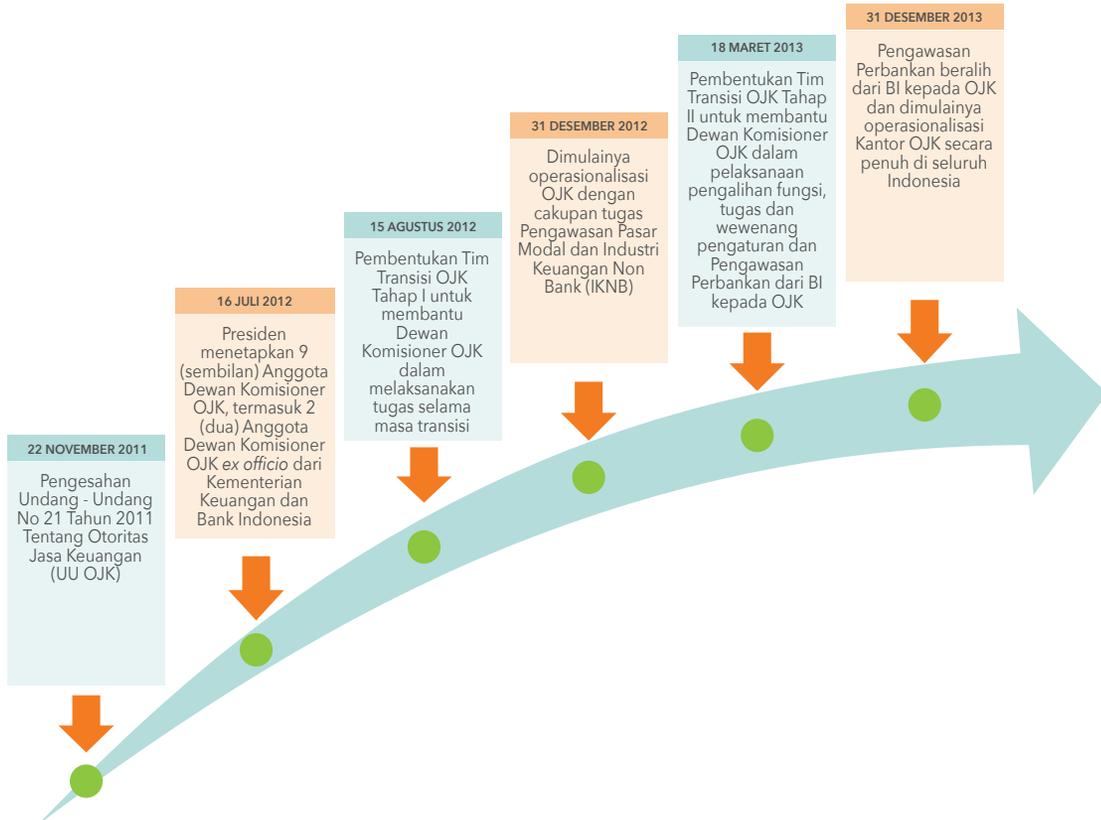
Halaman ini dengan sengaja dikosongkan

II. TENTANG OJK



Halaman ini dengan sengaja dikosongkan

LATAR BELAKANG (Sejarah Pembentukan OJK)



Misi OJK adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan, tugas dan wewenang OJK sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Misi tersebut OJK menetapkan Visi yang menggambarkan arah organisasi OJK dalam jangka panjang (20 - 25 tahun) untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. Dalam rangka mendukung pencapaian Misi dan Visi, OJK menyusun *Destination Statement* yang merupakan kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai OJK dalam jangka menengah (3 - 5 tahun) sebagaimana tercermin dalam kondisi utama dan persyaratannya.

MISI

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

VISI

1. Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, transparan, dan akuntabel
2. Mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

DESTINATION STATEMENT 2017

1. Menjadi lembaga profesional dalam pengaturan dan pengawasan SJK yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel
2. Mewujudkan pasar keuangan yang dalam (*financial market deepening*) dan inklusif
3. Mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan
4. Terdepan dalam sistem perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat

KONDISI UTAMA

1. Sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi
2. Pengaturan SJK yang selaras dan terintegrasi
3. Pengembangan SJK yang stabil dan berkesinambungan
4. Sistem Keuangan yang stabil dan berkelanjutan
5. Edukasi dan perlindungan konsumen yang optimal
6. *Strategic Support* yang handal

TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS OJK

OJK memiliki tujuan, kewenangan dan nilai-nilai strategis untuk memastikan seluruh kegiatannya mendukung pencapaian Misi dan Visi OJK. Tujuan OJK tersebut dapat tercapai jika fungsi dan pelaksanaan tugas OJK dalam bidang pengaturan dan pengawasan dapat terlaksana dengan baik.



Tujuan

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat



Fungsi

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

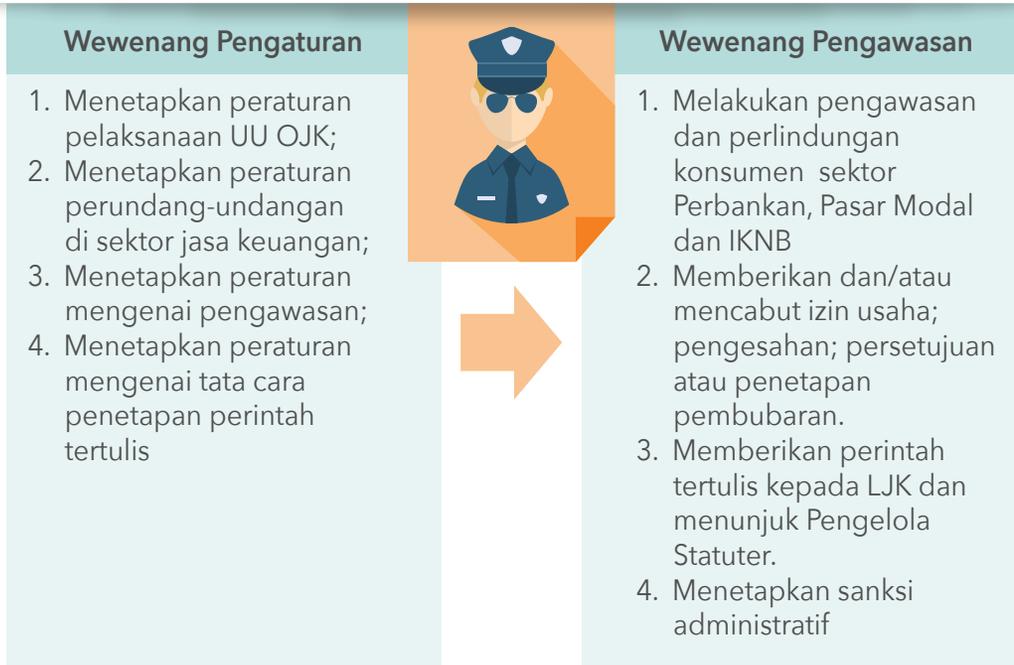


Tugas

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya





NILAI-NILAI STRATEGIS OJK

No.	Nilai-Nilai	Makna Nilai	Perilaku Utama
1	 <p>Integritas</p>	Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jujur dan dipercaya 2. Bijak 3. Konsisten dalam perkataan dan perbuatan
2	 <p>Profesionalisme</p>	Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belajar berkelanjutan 2. Memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan 3. Berkomitmen terhadap hasil karya yang berkualitas.
3	 <p>Sinergi</p>	Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun rasa saling percaya dan saling menghargai 2. Berkomunikasi secara efektif 3. Mencari solusi terbaik untuk memperoleh nilai tambah
4	 <p>Inklusif</p>	Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghargai keberagaman 2. Berperilaku adil 3. Partisipatif, kontributif, fasilitatif, dan edukatif.
5	 <p>Visioner</p>	Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (<i>forward looking</i>) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (<i>out of the box thinking</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari dan mengembangkan konsep dan ide baru 2. Melihat jauh ke depan 3. Menginspirasi dan mendukung perubahan

6 KANTOR REGIONAL DAN 29 KANTOR OJK SELURUH INDONESIA

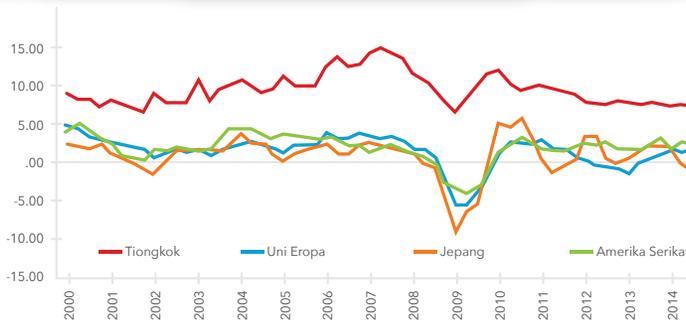


III. MAKROEKONOMI DAN SEKTOR JASA KEUANGAN



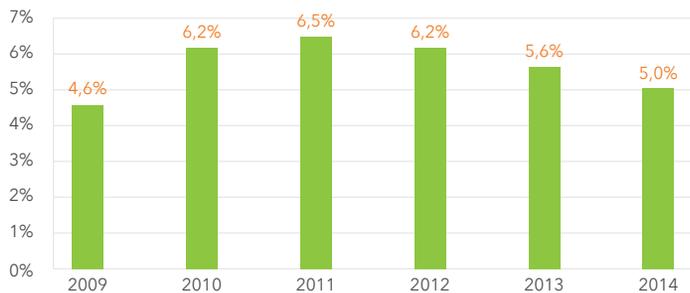
Halaman ini dengan sengaja dikosongkan

KONDISI MAKROEKONOMI (Pertumbuhan Ekonomi Dunia & Indonesia)



Ekonomi Dunia

Pemulihan ekonomi global sepanjang triwulan IV-2014 relatif tidak seimbang dengan kecepatan yang relatif rendah. Di satu sisi, ekonomi Amerika Serikat menunjukkan pemulihan yang semakin solid. Sementara di sisi lain, pemulihan di Eropa masih tersendat dan ekonomi Jepang memasuki resesi. Berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang turut berdampak terhadap persistennya penurunan harga komoditas dunia, terutama minyak bumi.

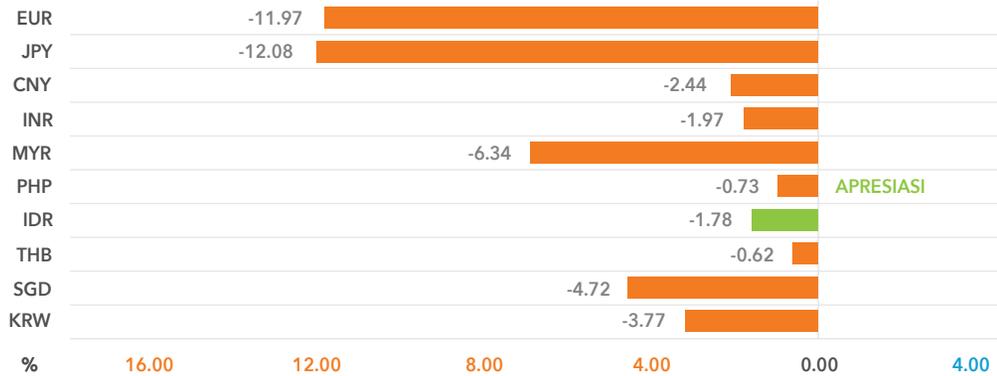


Ekonomi Indonesia

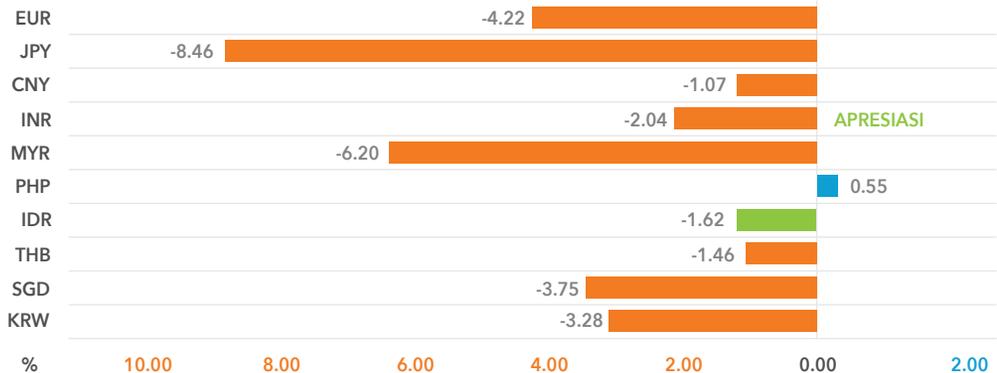
Sampai dengan triwulan IV-2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,01% dan inflasi tercatat sebesar 8,36% (yoy). Kenaikan inflasi pada triwulan IV-2014 terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM bersubsidi dan perkembangan harga *volatile foods* seperti beras dan cabai di akhir tahun. Di samping itu, tambahan tekanan inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga *administered prices* seperti tarif tenaga listrik, elpiji, dan angkutan udara.

KONDISI MAKROEKONOMI (Nilai Tukar Mata Uang Global)

31 Desember 2014 VS 31 Desember 2013



31 Desember 2014 VS 30 September 2014



Pergerakan Nilai Tukar Mata Uang Global

Secara umum nilai mata uang global cenderung melemah terhadap US Dollar. Tekanan ini terkait dengan melonjaknya harga minyak dunia, konflik geopolitik dan ekspektasi kenaikan *Fed Funds Rate* serta menguatnya Dollar AS terhadap mata uang global karena semakin solidnya pemulihan ekonomi AS. Penguatan Rupiah sempat terlihat pasca-pelantikan presiden baru dan pasca-pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi, namun kemudian kembali melemah. Selain dipengaruhi perkembangan global, kondisi fundamental ekonomi domestik, dan perkembangan politik dalam negeri, pelemahan nilai tukar ini juga dipengaruhi oleh tingginya permintaan valas untuk memenuhi kebutuhan valas di akhir tahun.

PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

Rasio	2014		Perubahan	
	TW III	TW IV	qoq	yoy
Total Aset (Rp milyar)	5.418.830	5.511.136	↑ 1,70%	↑ 14,39%
Kredit (Rp Milyar)	3.561.295	3.596.614	↑ 0,99%	↑ 11,89%
Dana Pihak Ketiga (Rp Milyar)	3.995.803	4.054.680	↑ 1,47%	↑ 13,79%
Giro (Rp Milyar)	916.972	933.145	↑ 1,76%	↑ 7,25%
Tabungan (Rp Milyar)	1.205.608	1.216.947	↑ 0,94%	↑ 6,89%
Deposito (Rp Milyar)	1.873.223	1.904.588	↑ 1,67%	↑ 22,49%
CAR (%)	19,53	19,77	↑ 0,24	↑ 1,23
ROA (%)	2,91	2,87	↓ (0,04)	↓ (0,22)
NIM (%)	4,21	4,24	↑ 0,03	↓ (0,63)
NPL Gross (%)	2,16	2,22	↑ 0,06	↑ 0,36
NPL Net (%)	1,19	1,15	↓ (0,04)	↑ 0,20
Rasio LDR (%)	88,93	88,65	↓ (0,28)	↓ (1,31)

Sumber : Sistem Informasi Perbankan OJK, November 2014

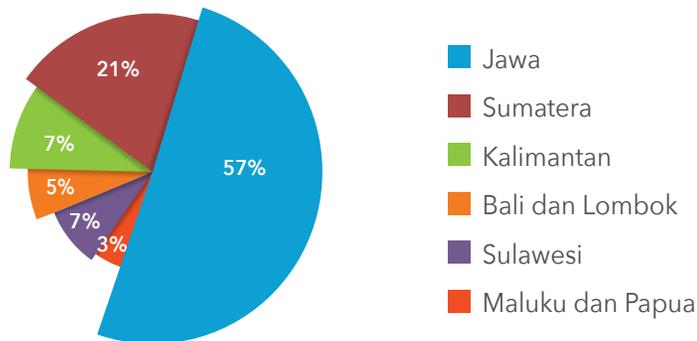
Statistik Perbankan Indonesia

Sampai dengan November 2014, Asset perbankan tumbuh 14,39% dibandingkan pada posisi Desember 2013. Pertumbuhan ini didukung oleh pertumbuhan Kredit sebesar 11,89 % dan pertumbuhan DPK sebesar 13,79%

Tingkat kesehatan Bank di Indonesia secara rata-rata meningkat dengan CAR 19,53% pada triwulan III-2014 menjadi 19,77% pada November 2014

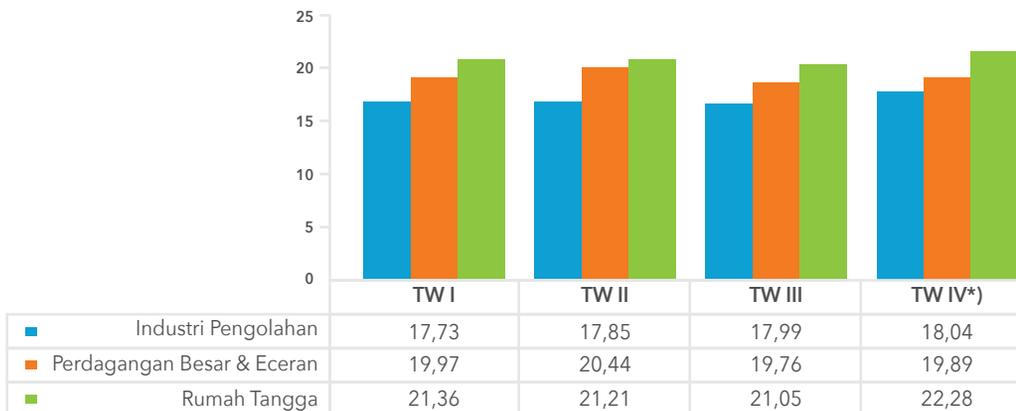
Dari sisi margin, perbankan Indonesia sedikit mengalami kenaikan *net interest margin* dari 4,21 pada triwulan III-2014 menjadi 4,24 pada November 2014

Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah



Penyebaran penyaluran UMKM sebagian besar masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara) yaitu sebesar 58% ,meningkat dibandingkan dengan triwulan III-2014 sebesar 57,32%

Konsentrasi Pemberian Kredit Terhadap 3 Sektor Periode 2014

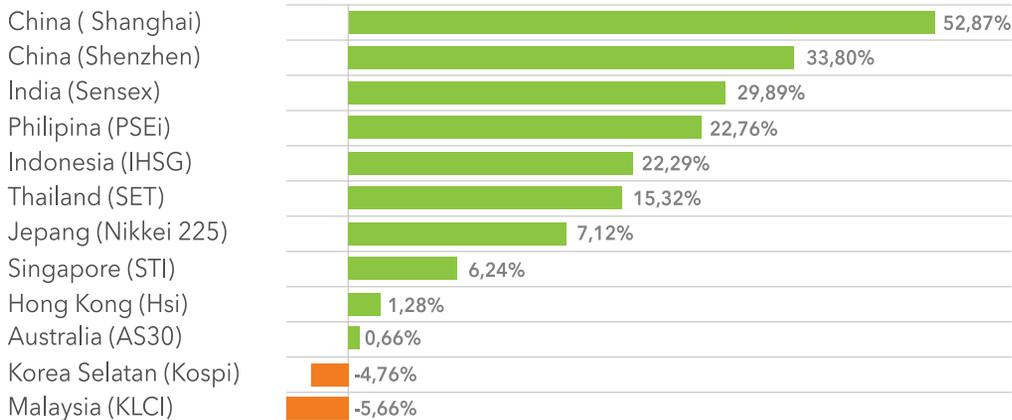


*Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, November 2014

Sektor yang paling banyak menyerap kredit perbankan pada triwulan IV-2014 masih didominasi oleh tiga sektor yaitu, sektor rumah tangga (22,28%), sektor perdagangan besar dan eceran (19,89%), dan sektor industri pengolahan (18,04%) atau secara keseluruhan porsi nya sebesar 60,21% dari total kredit perbankan

PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

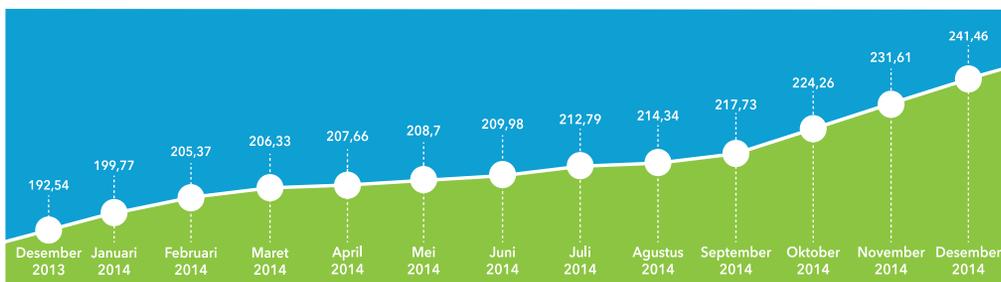
Perkembangan IHSG Global 2014



Pertumbuhan IHSG Indonesia & Dunia

IHSG selama tahun 2014 tumbuh sebesar 22,29% dan merupakan negara dengan pertumbuhan indeks pasar modal tertinggi ke-4 di dunia. Pertumbuhan Indeks pasar modal secara global mengalami pertumbuhan positif kecuali pasar modal di Korea Selatan dan Malaysia.

Perkembangan Reksa Dana Indonesia tahun 2014 (dalam triliun rupiah)



Selama tahun 2014, NAB Reksa Dana di Indonesia tumbuh 25,4% dibandingkan NAB tahun 2013. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Reksa Dana Pasar Uang.

**PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL
PERKEMBANGAN PENAWARAN UMUM
SAHAM PERDANA, *RIGHT ISSUE*, DAN OBLIGASI / SUKUK KORPORASI**

Jenis Penawaran	2010		2011		2012		2013		2014	
	Nilai Rp TRILIUN	PU	Nilai Rp TRILIUN	PU	Nilai Rp TRILIUN	PU	Nilai Rp TRILIUN	PU	Nilai Rp TRILIUN	PU
IPO Saham	29,56	23	19,70	25	10,35	24	16,73	30	8,30	20
<i>Right Issue</i> / PUT	48,67	31	39,79	25	19,75	22	40,81	31	39,36	21
Obligasi Korporasi/ Sukuk	36,60	26	46,46	39	87,15	62	57,50	50	48,74	48
Total	114,83	80	105,95	88	117,25	108	115,04	111	96,39	89

IPO Saham, *Right Issue* dan Obligasi

Jumlah dan Nilai Penawaran Umum untuk Saham Perdana, *Right Issue*, dan Obligasi / Sukuk Korporasi selama tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2013

Penurunan Jumlah dan Nilai Penawaran Umum disebabkan kondisi perekonomian global yang sedang dalam perbaikan serta adanya pelaksanaan pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden

PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Total Aset IKNB Triwulan IV-2014 (dalam triliun Rp)

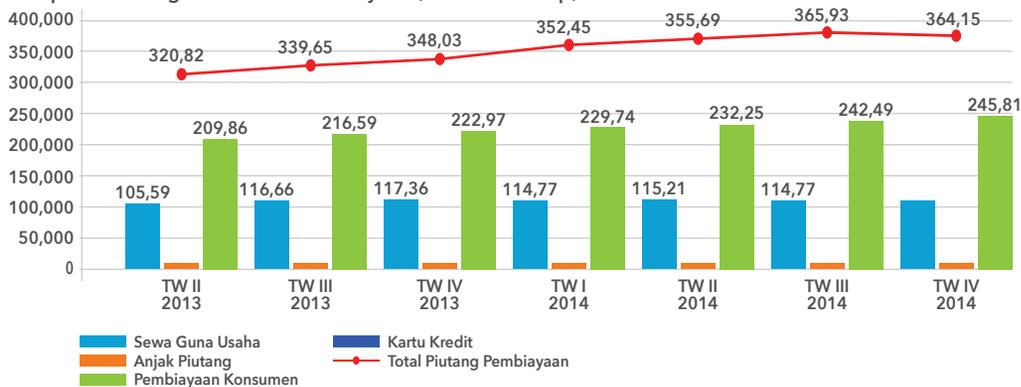
No	Industri	TW IV 2013	TW I 2014*)	TW II 2014	TW III 2014	TW IV 2014
1	Perasuransian	652,90	700,80	711,68	713,23	777,80
2	Dana Pensiun	162,06	166,29	174,32	178,99	187,52
3	Lembaga Pembiayaan	420,14	421,29	434,31	439,43	443,73
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus	96,06	98,54	105,09	110,10	116,76
5	Industri Jasa Penunjang IKNB	4,29	4,29	4,24	4,94	4,94
Total Aset		1.335,45	1.391,21	1.429,56	1.446,69	1.530,75

Pertumbuhan Aset Industri Keuangan Non Bank

Sampai dengan triwulan IV-2014, Aset IKNB meningkat sebesar 14,62% dibandingkan triwulan IV-2013.

Peningkatan Aset IKNB terbesar adalah Perasuransian (meningkat Rp124,90 T) dan Dana Pensiun (meningkat Rp25,46 T)

Komposisi Piutang Perusahaan Pembiayaan (dalam triliun Rp)



Pertumbuhan Piutang Pembiayaan & Komposisi Pembiayaan

Sampai dengan triwulan IV-2014, Komposisi piutang pembiayaan masih didominasi oleh Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha masing-masing sebesar 67% dan 30,2%

LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (LAKU PANDAI)

Laku Pandai adalah program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Laku Pandai ini diperlukan dengan beberapa alasan antara lain:



Banyak masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan

Komitmen OJK untuk mendukung terwujudnya keuangan inklusif.

Pemerintah telah mencanangkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada Juni 2012.

Perlu dikembangkan *branchless banking* agar layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya menjangkau segenap lapisan masyarakat

Tujuan dari Laku Pandai adalah untuk mendukung upaya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa dan kawasan timur Indonesia dengan menyediakan akses bagi masyarakat kecil untuk dapat melakukan transaksi keuangan khususnya perbankan dimanapun berada; dan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini

LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (LAKU PANDAI)

Fitur produk yang disediakan oleh Laku Pandai dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA)
- Kredit/Pembiayaan kepada Nasabah Mikro
- Asuransi Mikro



Jika waktu pemilikan tabungan BSA telah mencapai 6 bulan, atau sepanjang memenuhi pertimbangan tertentu dari bank penyelenggara, pemilik tabungan BSA dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kredit mikro yang pengajuannya dapat disampaikan di kantor bank, atau melalui agen yang akan diteruskan kepada kantor bank terdekat yang mengawasi agen tersebut.

Halaman ini dengan sengaja dikosongkan

IV. PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI OJK



Halaman ini dengan sengaja dikosongkan

PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN

Selama tahun 2014, OJK telah mengeluarkan 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) untuk mengatur Sektor Jasa Keuangan di Indonesia serta pengaturan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Berikut detail peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dapat dijabarkan sebagai berikut :

Perbankan

1. POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
2. POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
3. POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
4. POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
5. POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif
6. POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
7. POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah

Pasar Modal

1. POJK Nomor 15/POJK.04/2014 tentang Laporan Bulanan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
2. POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal
3. POJK Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan
4. POJK Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi
5. POJK Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi
6. POJK Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa
7. POJK Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek
8. POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
9. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
10. POJK tentang Nomor 34/POJK.04/2014 Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik

11. POJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
12. POJK Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
13. POJK Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas
14. POJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
15. POJK Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Industri Keuangan Non Bank

1. POJK Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pemasuransian
2. POJK Nomor 5/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan
3. POJK Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan
4. POJK Nomor 7/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan
5. POJK Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun
6. POJK Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
7. POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
8. POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
9. POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
10. POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro
11. POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan
12. POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
13. POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan
14. POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah

Edukasi dan Perlindungan Konsumen

1. POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Keuangan (Pungutan)

1. POJK Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan
2. POJK Nomor 4/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan

Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat

1. Kurikulum Sekolah

OJK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan seluruh Industri Jasa Keuangan menyusun Buku Pengayaan Kurikulum 2013 untuk Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X dengan judul "Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan."

2. *Launching Layanan Keuangan Mikro*

Komitmen OJK untuk mendukung industri keuangan agar memiliki layanan mikro untuk rakyat kecil, khususnya untuk sektor maritim, pertanian, serta pemberdayaan masyarakat kecil dan UMKM diwujudkan dalam peluncuran Layanan Keuangan Mikro pada 18 Desember 2014 bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) desa Karangsong, Indramayu, Jawa Barat.



3. Outreach Program

OJK menyelenggarakan Outreach Program yang ditujukan untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan kepada ibu rumah tangga dan UMKM. Materi yang diberikan antara lain meliputi pengelolaan keuangan keluarga dengan mengenalkan apa itu kebutuhan dan keinginan, dan pengenalan produk dan layanan keuangan tingkat dasar

4. Pasar Keuangan Rakyat

OJK menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat yang diikuti Lembaga Jasa Keuangan dan asosiasi industri jasa keuangan. Kegiatan Pasar Keuangan Rakyat meliputi konsultasi keuangan/kewirausahaan, program edukasi keuangan untuk anak, 18 talkshow dengan topik keuangan dan kewirausahaan, serta berbagai games edukatif. Diharapkan kegiatan ini akan mendukung terciptanya masyarakat cerdas keuangan.



5. Sarana Literasi dan Edukasi dengan SiMOLEK

Operasionalisasi SiMOLEK bertujuan untuk meningkatkan tingkat literasi produk dan jasa keuangan masyarakat Indonesia khususnya pada wilayah yang belum memiliki infrastruktur yang baik. Saat ini, wilayah operasionalisasi SiMOLEK berada di 15 kota yaitu di Jabodetabek, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Pekanbaru, Cirebon, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Samarinda, Banjarmasin, Manado dan Jayapura dengan jumlah armada 41 mobil.

6. Kompetisi Inklusi Keuangan (Koinku)

OJK menggalang KOINKU untuk menjangkau ide kreatif bisnis model inklusi keuangan yang dapat diaplikasikan kepada masyarakat. Hasil karya ilmiah bisnis model inklusi keuangan diharapkan dapat dikembangkan sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat secara luas untuk meningkatkan pemahaman terhadap sektor jasa keuangan.

7. Workshop LAPS

Dalam mempersiapkan pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), OJK membekali sumber daya manusia dengan keahlian dan kompetensi yang mendukung implementasi LAPS di sektor jasa keuangan secara menyeluruh dan terstandar, dengan menyelenggarakan masing-masing tiga kali Workshop Mediasi dan Workshop Ajudikasi dan Arbitrase. Dari workshop tersebut telah dihasilkan 72 mediator, 67 ajudikator/arbitrer, dan 23 arbitrer syariah.

8. Edukasi Keuangan

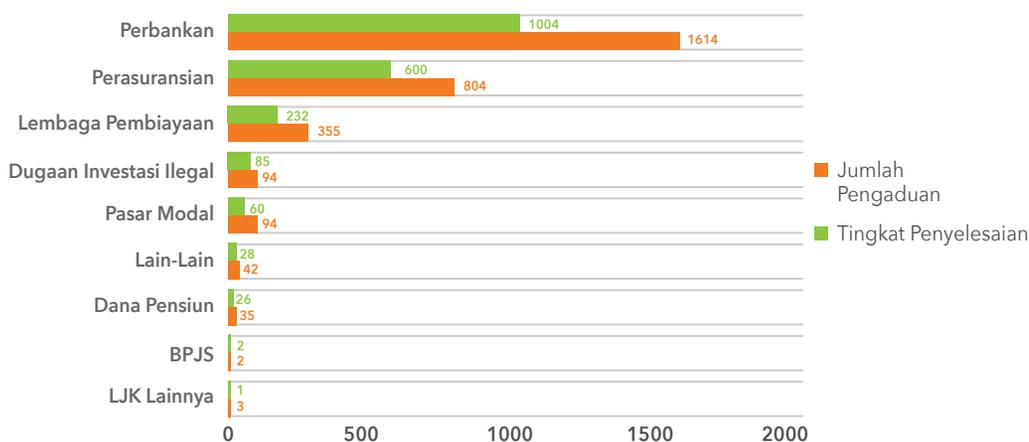
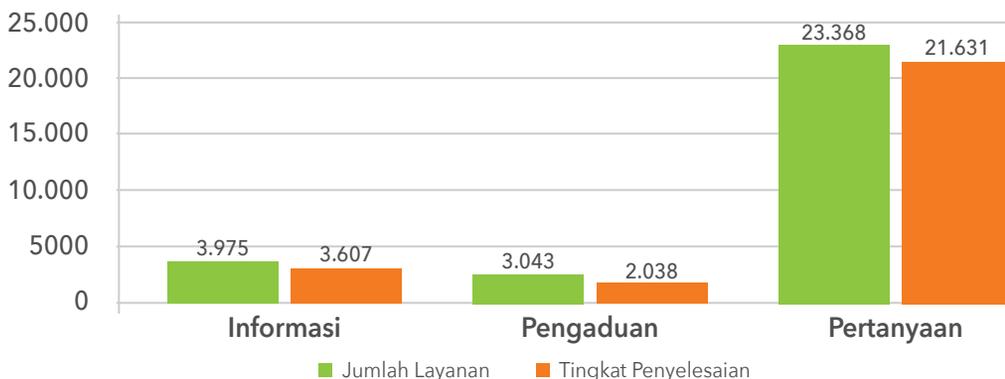
OJK melaksanakan program edukasi keuangan di 24 kota secara simultan meliputi diskusi keuangan dengan empat komunitas (Ibu Rumah Tangga, UMKM, Akademisi, dan Umum), Pameran Literasi Keuangan (Edu Expo), dan edukasi wartawan dalam bentuk workshop dan edulunch. Disamping itu, OJK mendiversifikasi program edukasi keuangan dengan peluncuran kegiatan "OJK Mengajar" yang ditujukan pada kalangan pelajar. Sebagai pilot project, OJK Mengajar mendatangi pelajar SMU di 4 kota yaitu Palu, Pontianak, Medan dan Balige.



9. Seminar Internasional

OJK menyelenggarakan dua seminar internasional OJK dengan tema "A new era of conduct supervision: consequences, challenges, and opportunities" untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pengawasan market conduct dan "International Seminar on Financial Literacy for Women and SMEs" untuk berbagi pengalaman pelaksanaan edukasi dari berbagai negara dan lembaga internasional.

Pelayanan Konsumen Sektor Jasa Keuangan



Pada 6 Februari 2014, OJK meluncurkan *Integrated Financial Customer Care* (iFCC) yang memiliki fasilitas *trackable and traceable*.

Sampai dengan Desember 2014, iFCC OJK telah memberikan 30.386 layanan kepada konsumen dan masyarakat, yang terdiri dari penerimaan informasi (laporan) sebanyak 3.975 dengan tingkat penyelesaian 91%, pemberian informasi (pertanyaan) sebanyak 23.368 dengan tingkat penyelesaian 93%, dan pengaduan sebanyak 3.043 dengan tingkat penyelesaian 67%

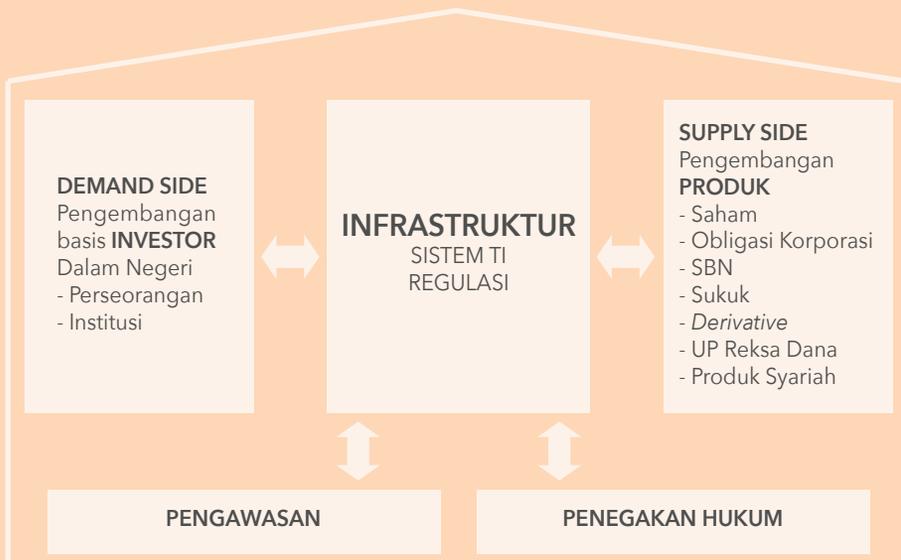
Pengaduan didominasi oleh sektor Perbankan diikuti dengan IKNB yang terdiri Perasuransian dan Lembaga Pembiayaan. Setelah itu diikuti dengan pengaduan dari Pasar Modal, dugaan investasi ilegal, dan pengaduan lainnya

PENDALAMAN PASAR (MARKET DEEPENING) PASAR MODAL

Dalam rangka mewujudkan industri Pasar Modal sebagai penggerak perekonomian nasional yang berdaya saing global, OJK melaksanakan program kerja berupa pendalaman pasar. Program pendalaman pasar terdiri dari pengembangan infrastruktur baik sistem Teknologi Informasi maupun regulasi, pengembangan basis investor domestik, pengembangan produk, serta mempersiapkan perangkat pengawasan dan penegakan hukum.

MARKET DEEPENING BUILDING BLOCKS

Mewujudkan Industri Pasar Modal Sebagai Penggerak Perekonomian Nasional Yang Tangguh dan Berdaya Saing Global



Implementasi kegiatan *market deepening* bertujuan mendukung peningkatan *supply* dan *demand* di Pasar Modal Indonesia yang dilaksanakan dalam enam kelompok bauran strategi pengembangan yaitu

- Pengembangan pasar perdana;
- Pengembangan pasar sekunder;
- Pasar surat utang;
- Pasar Modal Syariah;
- Perizinan, registrasi, pelaporan, dan pengawasan elektronik;
- Kegiatan sosialisasi dan edukasi.

ASURANSI MIKRO

Untuk mewujudkan industri asuransi yang inklusif, OJK memiliki misi untuk mengembangkan asuransi yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau dikenal sebagai asuransi mikro. Program pengembangan asuransi mikro menitik beratkan pada area

- (i) meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap asuransi mikro,
- (ii) meningkatkan kapasitas industri dan regulator,
- (iii) mendorong ketersediaan produk asuransi mikro; dan
- (iv) menyusun peraturan pendukung.

Selama tahun 2014 OJK bekerjasama dengan berbagai pihak telah melakukan serangkaian kegiatan sesuai dengan fokus area program pengembangan asuransi mikro yaitu:

1. Edukasi kepada masyarakat dalam bentuk seminar dan pameran produk asuransi mikro. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk asuransi mikro.
2. Survei pasar dan pelatihan bagi perusahaan asuransi mengenai asuransi mikro untuk memperoleh informasi mengenai potensi pasar, jenis produk yang dibutuhkan, dan saluran distribusi yang dapat digunakan, serta meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai asuransi mikro
3. Pembuatan tujuh produk standar asuransi mikro, yaitu Asuransi Mikro Syariah Si Bijak, Asuransi Jiwa Mikro Si Peci, Asuransi Mikro Asuransiku, Asuransi Umum Mikro Rumahku, Asuransi Umum Mikro Warisanku, Asuransi Mikro Stop Usaha Gempa Bumi, dan Asuransi Mikro Stop Usaha Erupsi. Produk dimaksud memiliki premi tidak lebih dari Rp50.000 dan menggunakan ketentuan polis yang sangat sederhana sehingga diharapkan dapat dijangkau dan mudah dipahami oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Penyusunan peraturan mengenai asuransi mikro yang diharapkan dapat memberikan kerangka pengaturan yang jelas dalam pemasaran produk asuransi mikro. Di dalam rancangan peraturan antara lain diusulkan perluasan saluran pemasaran produk asuransi mikro dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen.



V. PERENCANAAN STRATEGIS 2014



Halaman ini dengan sengaja dikosongkan

OJK telah memiliki sistem/mekanisme manajemen strategi yang mengacu pada sistem *Balanced Scorecard*. Sistem *Balanced Scorecard* tersebut diaplikasikan didalam OJK melalui Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (Sistem MSAK) yang mengatur Manajemen Strategi, Manajemen Anggaran dan Manajemen Kinerja. Untuk melaksanakan sistem MSAK dengan baik melalui pelaksanaan pengelolaan kinerja yang sesuai dengan *governance*, OJK telah memiliki sistem pengelolaan kinerja yang komprehensif yaitu SIMPEL OJK



Manajemen Strategi, yang terdiri dari perumusan, operasionalisasi, pelaksanaan dan monitoring, serta evaluasi pelaksanaan strategi



Manajemen Anggaran, yaitu rencana keuangan yang disusun berdasarkan kegiatan dan rencana kerja sebagai penjabaran strategi, yang terdiri dari penyusunan pagu indikatif, penyusunan dan pengajuan RKA ke DPR, dan monitoring serta evaluasi RKA



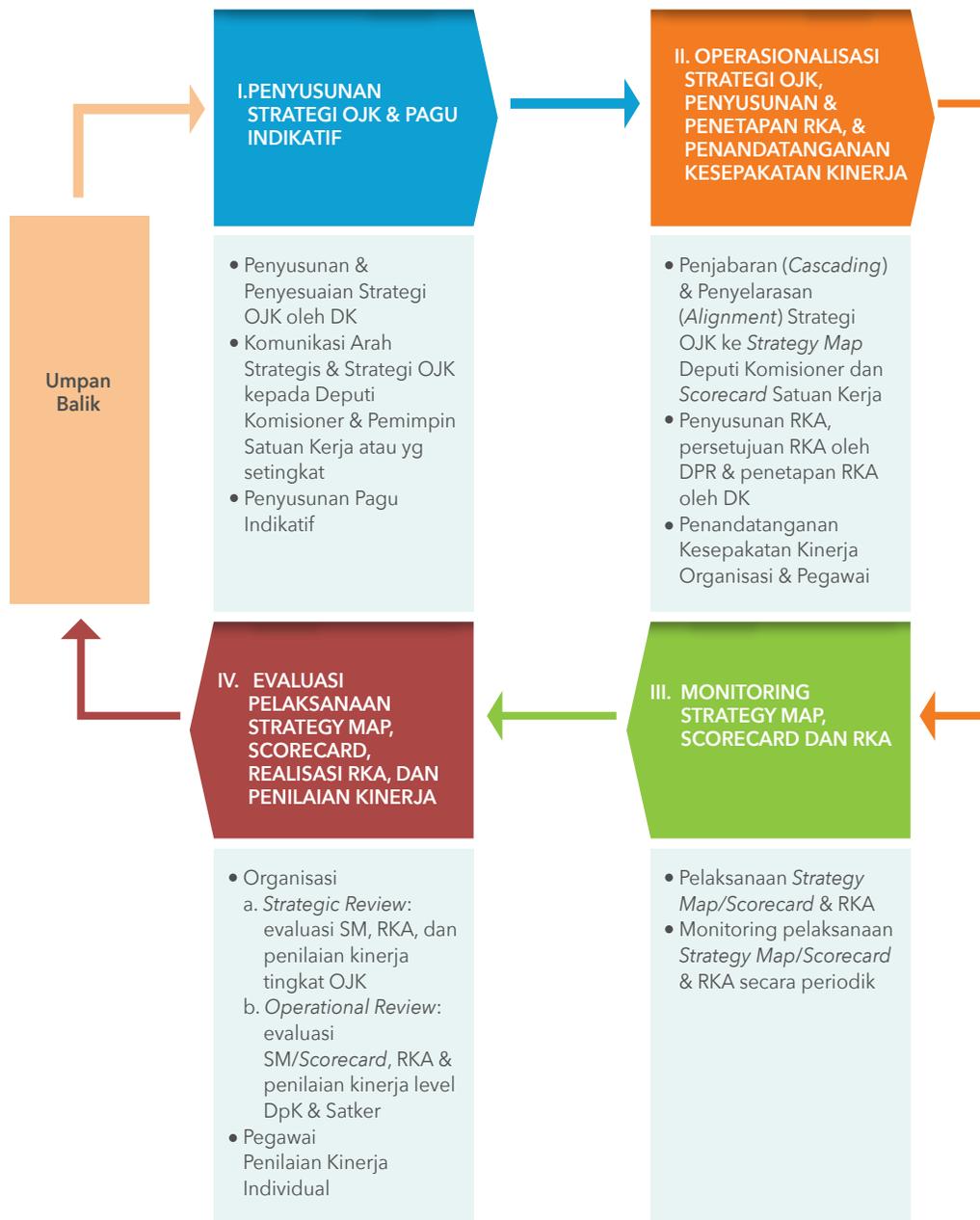
Manajemen Kinerja, yang menilai kinerja berdasarkan pencapaian strategi, pelaksanaan tugas pokok dan realisasi anggaran, yang terdiri dari penyusunan kontrak kerja, monitoring dan evaluasi/penilaian kinerja organisasi dan individu pegawai.

Mendukung pencapaian Arah Strategis dan pelaksanaan tugas OJK, melalui penyelenggaraan kelembagaan yang sehat dan bertanggung jawab, dalam bentuk:

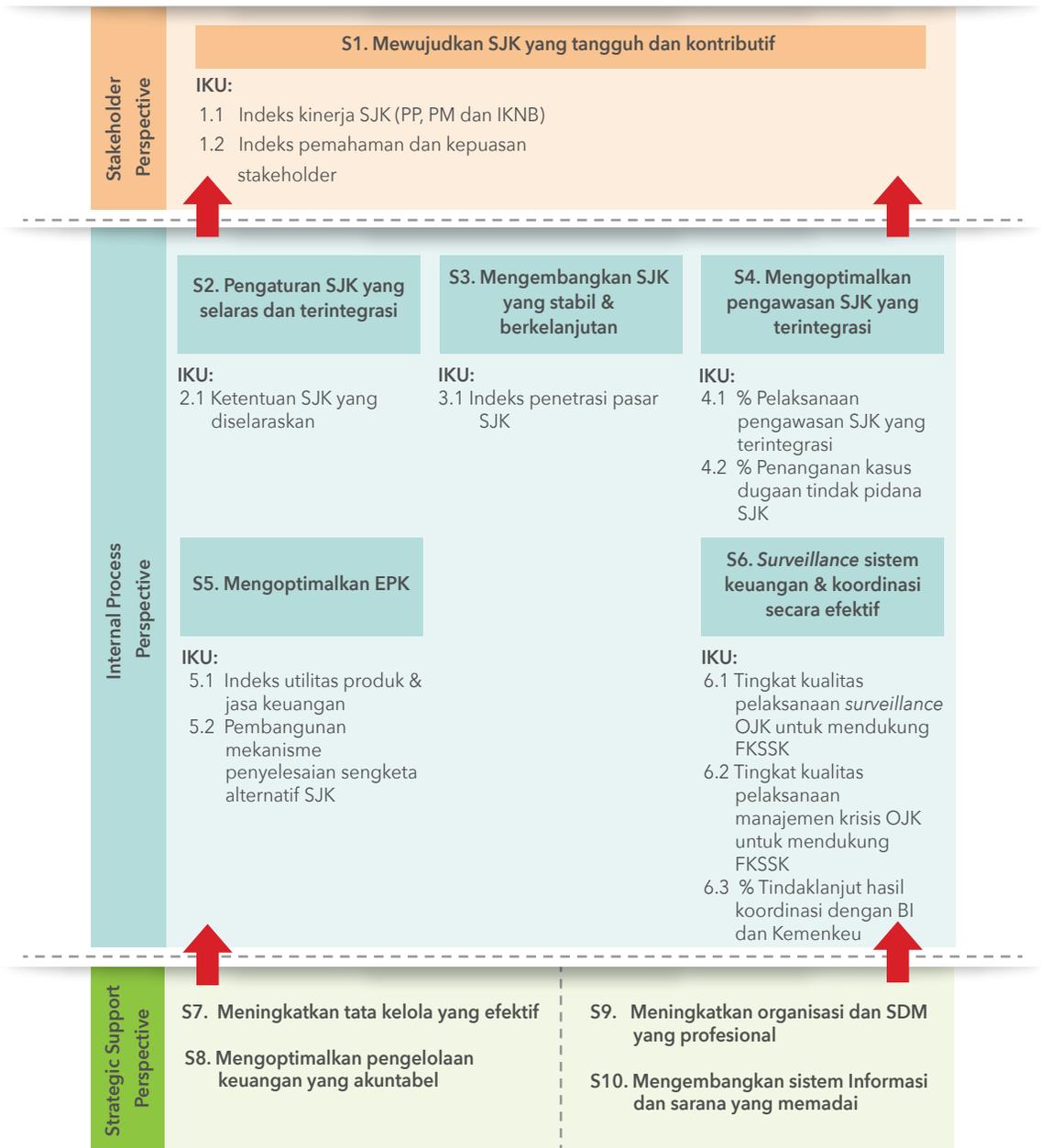
- a. **Peningkatan efektivitas Manajemen Strategi** sehingga keseluruhan kegiatan Satuan Kerja terkelola selaras dengan Arah Strategis;
- b. **Peningkatan efektivitas Manajemen Anggaran** sehingga anggaran efektif dan efisien, selaras dengan pencapaian kinerja OJK yang dilandasi oleh prinsip-prinsip tata kelola yang baik;
- c. **Peningkatan efektivitas Manajemen Kinerja** sehingga penilaian kinerja dapat dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel dengan mengacu kepada indikator kinerja dan ukuran yang transparan;

Dalam rangka operasionalisasi MSAK, OJK memiliki siklus MSAK yang terdiri dari empat tahap yaitu penyusunan strategi, operasionalisasi strategi, pelaksanaan dan monitoring strategi, serta evaluasi pelaksanaan strategi dan realisasi penyerapan anggaran. Hasil dari penyusunan strategi OJK dijabarkan melalui *Strategy Map* yang terdiri dari sasaran strategis yang merupakan panduan mengenai strategi utama dalam mencapai tujuan organisasi dan indikator kinerja utama yang merupakan indikator finansial dan non finansial yang mencerminkan keberhasilan pencapaian strategis.

SIKLUS MANAJEMEN STRATEGI, ANGGARAN, DAN KINERJA (MSAK)



Strategy Map merupakan gambaran mengenai keterkaitan atau hubungan kausal antar Sasaran Strategis yang memiliki IKU untuk periode 1 tahun. *Strategy Map* ini mengacu dari penerapan *Balanced Scorecard* dengan menggunakan 3 perspektif yaitu *Stakeholder*, *Internal Process* & *Strategic Support* dan terdiri atas 10 Sasaran Strategis



VI. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS OJK 2014



Halaman ini dengan sengaja dikosongkan

PROSES PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI

Untuk memastikan bahwa setiap Sasaran Strategis OJK dapat tercapai dan berjalan dengan baik, OJK memiliki proses pengelolaan kinerja secara terencana dan terjadwal yang melibatkan seluruh Satuan Kerja.



Berdasarkan proses evaluasi kinerja atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama bersama dengan seluruh Satuan Kerja, pencapaian kinerja OJK pada tahun 2014 adalah 104,32%. Adapun penjabarannya tercermin pada gambar di halaman selanjutnya.

PENCAPAIAN KINERJA OJK 2014

104,32%

Stakeholder Perspective

S1. Mewujudkan SJK yang tangguh dan kontributif

107,19%

IKU:

- 1.1 Indeks kinerja SJK (PP, PM dan IKNB)
- 1.2 Indeks pemahaman dan kepuasan stakeholder

Internal Process Perspective

S2. Pengaturan SJK yang selaras dan terintegrasi

110%

IKU:

- 2.1 Ketentuan SJK yang diselaraskan

S3. Mengembangkan SJK yang stabil & berkelanjutan

91,52%

IKU:

- 3.1 Indeks penetrasi pasar SJK

S4. Mengoptimalkan pengawasan SJK yang terintegrasi

101,67%

IKU:

- 4.1 % Pelaksanaan pengawasan SJK yang terintegrasi
- 4.2 % Penanganan kasus dugaan tindak pidana SJK

S5. Mengoptimalkan EPK

104%

IKU:

- 5.1 Indeks utilitas produk & jasa keuangan
- 5.2 Pembangunan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif SJK

S6. Surveillance sistem keuangan & koordinasi secara efektif

108,75%

IKU:

- 6.1 Tingkat kualitas pelaksanaan *surveillance* OJK untuk mendukung FKSSK
- 6.2 Tingkat kualitas pelaksanaan manajemen krisis OJK untuk mendukung FKSSK
- 6.3 % Tindaklanjut hasil koordinasi dengan BI dan Kemenkeu

Strategic Support Perspective

S7. Meningkatkan tata kelola yang efektif

92,23%

S8. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan yang akuntabel

107,4%

S9. Meningkatkan organisasi dan SDM yang profesional

106,58%

S10. Mengembangkan sistem Informasi dan sarana yang memadai

104,17%

S1. Mewujudkan SJK yang tangguh dan kontributif

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks Kesehatan SJK seperti CAR (Perbankan), Perusahaan efek anggota bursa yg memenuhi persyaratan MKBD (PM), dan *gearing ratio* (IKNB) serta tingkat pemahaman dan kepuasan pemangku kepentingan terhadap kinerja OJK. Sampai dengan akhir 2014, indeks kesehatan SJK berada di atas target yang ditetapkan. Sedangkan tingkat pemahaman dan kepuasan pemangku kepentingan terhadap kinerja OJK meningkat dari 4,26 (2013) menjadi 4,32 (2014)



S2. Pengaturan SJK yang selaras dan terintegrasi

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui jumlah peraturan yang dikeluarkan OJK. Selama tahun 2014, OJK berhasil menerbitkan 39 POJK melebihi rencana peraturan yang akan diterbitkan sebanyak 19 POJK.



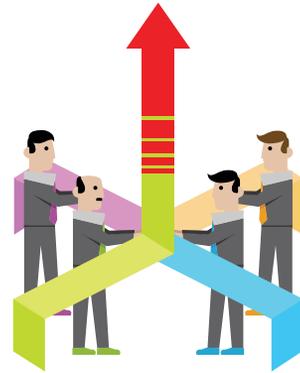
S3. Mengembangkan SJK yang stabil dan berkelanjutan

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi pasar, baik untuk sektor Perbankan, Pasar Modal maupun IKNB. Sebagian besar indeks penetrasi pasar menunjukkan hasil yang positif terlihat dari nilai indeks penetrasi pertumbuhan aset Perbankan dan IKNB serta pertumbuhan Emiten dan Produk Pasar Modal Syariah.



S4. Mengoptimalkan pengawasan SJK yang terintegrasi

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui pelaksanaan SJK yang terintegrasi serta penanganan kasus dugaan tindak pidana SJK. Selama 2014 OJK telah memulai melakukan Pengawasan Terintegrasi kepada 13 Konglomerasi Keuangan dan telah melebihi target dari yang direncanakan. OJK juga telah melakukan analisa awal atas kasus dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan



S5. Mengoptimalkan EPK

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui Kenaikan Indeks Utilitas Produk/Jasa Keuangan dan pembangunan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di SJK. Sampai dengan periode laporan, kenaikan indeks Produk/Jasa Keuangan adalah sebesar 2,16% dari 2% yang telah ditargetkan. OJK juga telah menyelesaikan 12 tahap pembangunan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di SJK

S6. *Surveillance* Sistem Keuangan & Koordinasi Secara Efektif

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur antara lain melalui kualitas pelaksanaan *surveillance* OJK dan persentase tindak lanjut hasil koordinasi dengan BI serta Kementerian Keuangan. Selama 2014, telah dilakukan 22 tindak lanjut hasil koordinasi dengan BI dan Kementerian Keuangan. Sedangkan kualitas pelaksanaan *surveillance* OJK untuk mendukung FKSSK dinilai dengan baik dengan skor 4.8 melebihi dari target yang telah ditentukan. Penilaian ini dilakukan oleh anggota FKSSK



S7. Meningkatkan tata kelola yang efektif

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui ketepatan waktu penyampaian laporan dan tindak lanjut temuan audit pantau. Dalam hal penyampaian laporan, 93% laporan kegiatan disampaikan tepat waktu. Sementara itu 90,7% temuan audit pantau telah ditindaklanjuti



S8. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan yang akuntabel

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui predikat laporan keuangan OJK dan penyerapan anggaran OJK. Laporan Keuangan OJK tahun 2013 mendapatkan predikat WTP dan penyerapan anggaran OJK selama 2014 adalah sebesar 82,7% dari target penyerapan 80%

S9. Meningkatkan organisasi dan SDM yang profesional

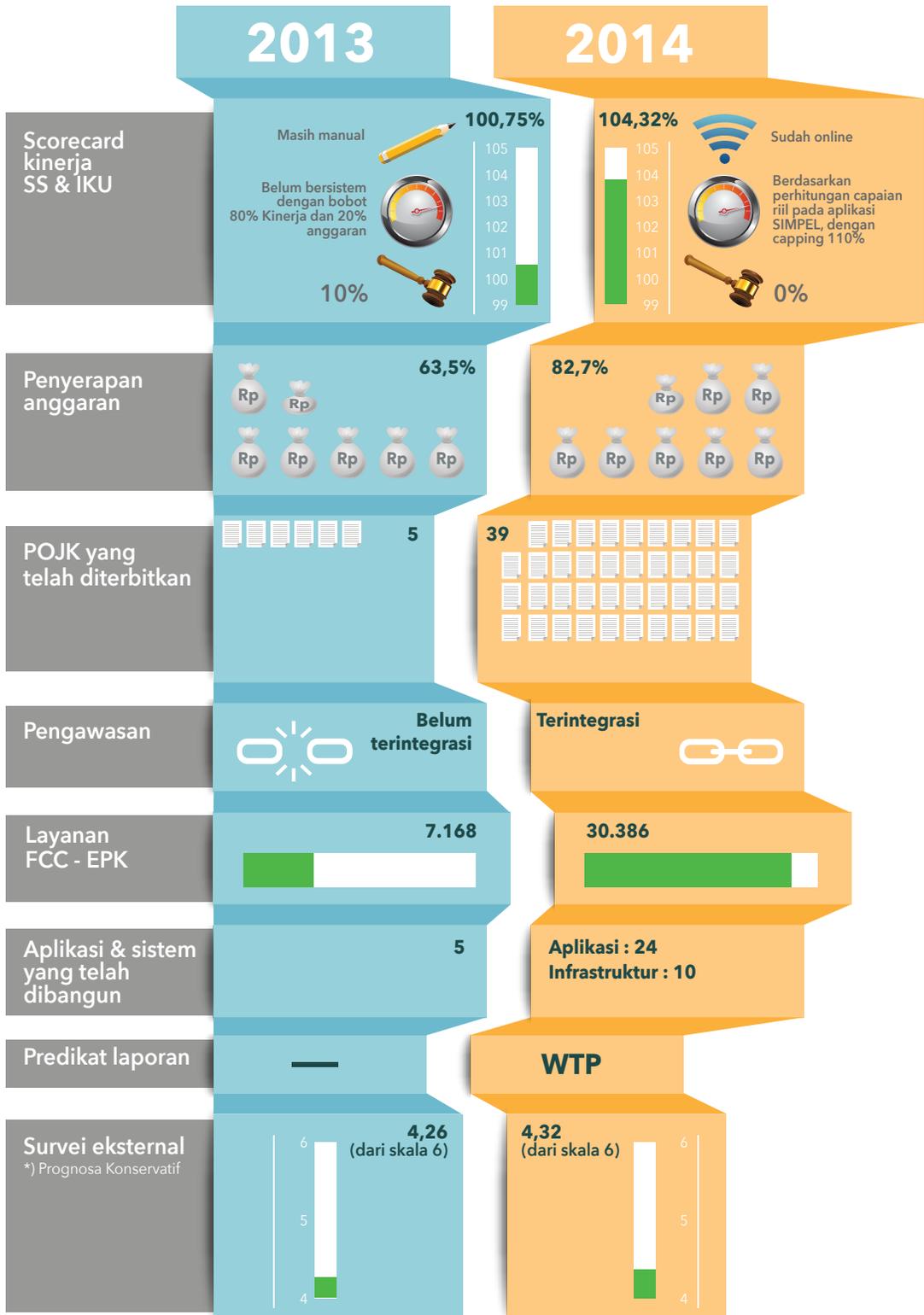
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat penyelesaian kelengkapan perangkat organisasi OJK dan tingkat pemenuhan SDM. Kedua target tersebut telah dicapai dengan baik selama tahun 2014



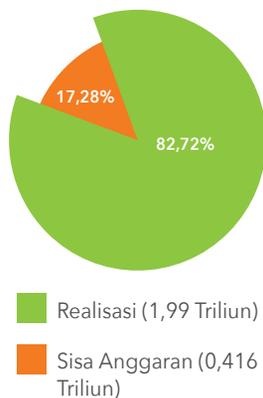
S10. Mengembangkan sistem Informasi dan sarana yang memadai

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui realisasi penyelesaian pengembangan infrastruktur TI serta penyediaan perkantoran OJK. Selama tahun 2014 OJK telah mengembangkan 24 aplikasi serta 10 infrastruktur TI. Selain itu OJK telah melakukan penyediaan atas gedung kantor OJK di beberapa kota antara lain Kupang, Tegal, Purwokerto, Palangkaraya, Ambon dan Yogyakarta

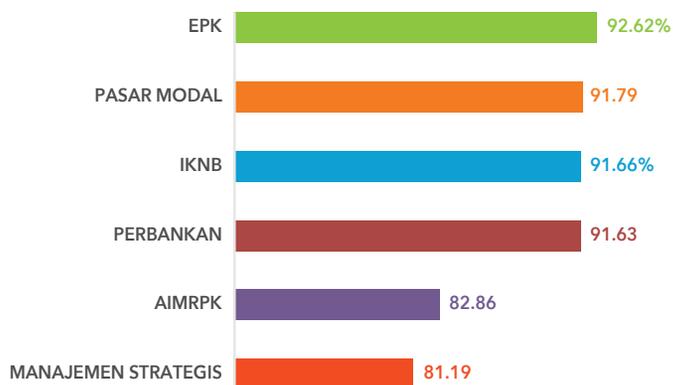
PERBANDINGAN KINERJA OTORITAS JASA KEUANGAN TAHUN 2013 DAN 2014



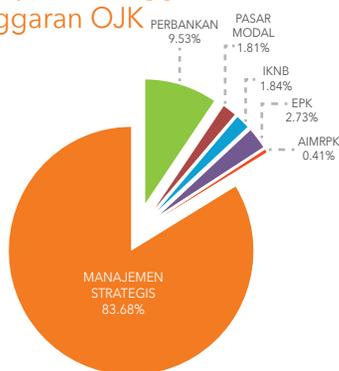
Realisasi Anggaran OJK Tahun 2014



Realisasi Anggaran OJK Per Bidang



Komposisi Pengguna Anggaran OJK



- Pada tahun 2014 realisasi anggaran OJK mencapai 1,99 Triliun atau 82,7% dari pagu anggaran tahun 2014.
- Rata-rata realisasi anggaran dari masing masing Satuan kerja adalah 81%-92% dengan pengguna anggaran paling besar adalah dari bidang manajemen strategis yang berkontribusi 83% dari seluruh realisasi anggaran di OJK.

Halaman ini dengan sengaja dikosongkan

VII. PENGAWASAN TERINTEGRASI



Halaman ini dengan sengaja dikosongkan



Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan adalah pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas untuk mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Tujuan dari pengawasan konglomerasi adalah:

- Memberikan gambaran secara menyeluruh atas Konglomerasi Keuangan yang diawasi.
- Mengidentifikasi struktur usaha, aktivitas bisnis utama, aktivitas bisnis pendukung, dan aktivitas bisnis penunjang yang berpengaruh dalam konglomerasi keuangan.
- Landasan pokok untuk penilaian profil risiko dan tingkat kondisi konglomerasi keuangan

Salah satu pelaksanaan dari Pengawasan Terintegrasi adalah melakukan Pemahaman Terhadap Konglomerasi (KYFC) yang komprehensif dan merupakan identifikasi awal mengenai kondisi dari konglomerasi keuangan yang meliputi antara lain struktur Konglomerasi Keuangan, organisasi dan lini bisnis dari masing-masing lembaga jasa keuangan dalam satu Konglomerasi Keuangan, struktur manajemen, pengendalian internal, penerapan *good corporate governance* secara *group-wide* dan penerapan manajemen risiko secara *group-wide*. Komponen KYFC terdiri dari

- Gambaran struktur Konglomerasi Keuangan yang meliputi informasi umum, struktur kepemilikan, struktur kelompok usaha, struktur pengurus, dan jaringan kantor,
- Bisnis utama dan kontribusi LJK terhadap Konglomerasi Keuangan, dan Infrastruktur pendukung.

Informasi pengawasan mencakup Rencana Bisnis, Penerapan *Good Corporate Governance*, Penerapan Manajemen Risiko, Eksposur Transaksi Intra-grup dan Pihak Terkait, Sistem Pengendalian Intern, Kinerja Keuangan, dan Informasi Lainnya.

Selain melakukan KYFC, OJK juga melakukan pembangunan infrastruktur serta langkah-langkah sebagai berikut

- Pembentukan Unit Kerja Pengawasan Terintegrasi (UKPT)
- Pengembangan sistem pelaporan jasa keuangan (*e-reporting* tahap I dan aplikasi *Database* Pelaku Terintegrasi)
- PDK No.1/PDK.03/2013 Road Map Pengembangan Pengawasan Terintegrasi
- POJK No.17/POJK.03/2014 Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- POJK No.18/POJK.03/2014 Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- SE DK No.7/SEDK.03/2014 Pembentukan Forum Panel Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan



VIII. FORUM KOORDINASI STABILITAS SISTEM KEUANGAN



Halaman ini dengan sengaja dikosongkan



Manajemen Krisis dan Koordinasi dalam Kerangka FKSSK

OJK menilai secara umum kondisi sektor jasa keuangan domestik pada tahun 2014 masih terjaga di tengah moderasi pertumbuhan ekonomi serta berbagai gejolak yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pertumbuhan kredit perbankan dan piutang pembiayaan menunjukkan perlambatan, sejalan dengan proses penyesuaian dalam perekonomian domestik. Kinerja pasar saham secara umum masih terjaga dengan baik. Berdasarkan pemantauan, ketahanan industri perbankan dan kesehatan IKNB masih memadai. Risiko likuiditas, kredit, dan pasar perbankan secara umum masih terjaga, ditopang oleh permodalan yang memadai. Alat likuid perbankan cukup memadai untuk mengantisipasi potensi penarikan Dana Pihak Ketiga.

Secara internal, Protokol Manajemen Krisis (PMK) OJK telah berlaku efektif dan telah memasukkan unsur PMK bidang perbankan yang kewenangan pengaturan dan pengawasannya telah beralih dari Bank Indonesia ke OJK sejak 31 Desember 2013. Seiring dengan telah bergabungnya fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan tersebut, telah dimulai sejumlah langkah tindak lanjut, seperti revisi ketentuan PMK internal beserta pedoman pelaksanaannya (*Crisis Binder*).

Dalam hal pemantauan stabilitas sistem keuangan domestik, OJK berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) baik pada level teknis, level deputy (*deputies meeting*), hingga rapat anggota FKSSK (*high-level meeting*). Sepanjang tahun 2014,

FKSSK telah melaksanakan Rapat koordinasi FKSSK sebanyak empat kali. Di samping itu, telah diselenggarakan pula delapan kali rapat koordinasi tingkat deputi serta rapat-rapat teknis Sekretariat FKSSK. Dalam rapat tersebut, FKSSK membahas kondisi terkini perekonomian dan sektor jasa keuangan domestik, risiko-risiko yang dihadapi, serta langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut.

FKSSK juga telah bekerjasama menyelenggarakan simulasi mini penanganan krisis yang bertujuan untuk menguji efektivitas koordinasi antar-institusi dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis di sistem keuangan domestik, serta menguji eektivitas PMK nasional maupun PMK internal masing-masing institusi. Evaluasi pelaksanaan simulasi diharapkan menjadi masukan untuk penyempurnaan PMK serta koordinasi antar-institusi pada masa yang akan datang.



IX. TATA KELOLA DAN MANAJEMEN STRATEGIS



Halaman ini dengan sengaja dikosongkan

RAPAT DEWAN KOMISIONER

OJK memiliki sistem tata kelola organisasi yang meliputi Rapat Dewan Komisioner, Audit Internal Manajemen Resiko dan Pengendalian Kualitas, Kode Etik, Prinsip *Good Governance*, dan Sistem MSAK.

Rapat Dewan Komisioner sesuai UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 24 merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di OJK. Forum pengambilan keputusan ini dilakukan secara rutin satu kali setiap minggu. Tujuan forum RDK adalah untuk menetapkan atau melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan OJK yang bersifat strategis, serta menerima laporan atas kebijakan yang wajib diketahui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2014, OJK telah menyelenggarakan RDK sebanyak 67 kali dengan 250 topik yang dibahas.

Topik Rapat Dewan Komisioner



Audit Internal

Standar audit yang digunakan OJK mengacu pada standar internasional yaitu *International Professional Practice Framework (IPPF)* yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor (IIA). Penggunaan standar ini dimaksudkan agar terdapat kesamaan dalam wewenang, fungsi, dan tanggung jawab atas fungsi audit internal. Selama 2014, telah diselesaikan audit lapangan pada 19 Satuan Kerja untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas telah didukung oleh peraturan dan ketentuan, serta kesesuaian proses bisnis dengan ketentuan yang berlaku

Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko yang digunakan OJK mengacu pada kerangka kerja Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 31000 karena memberikan pendekatan pengelolaan risiko yang universal, menyeluruh, dan berkelanjutan. Selama tahun 2014 OJK telah memiliki Profil Risiko Semester 2 tahun 2014 dan Profil Risiko Semester 1 tahun 2015

Pengendalian Kualitas

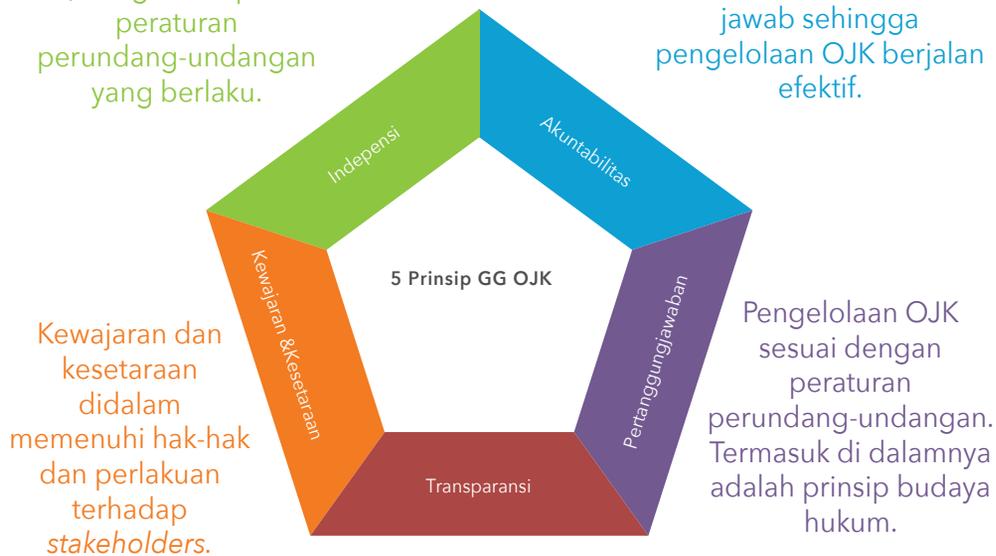
Rujukan konsep dan kerangka kerja pengendalian kualitas OJK menggunakan standar internasional *ISO 9001 Quality Management Systems-Requirements* dan *ISO 9004 Managing for the Sustained Success of an Organization - a Quality Management Approach* serta mengadopsi konsep *Total Quality Management (TQM)*. Kegiatan pengendalian kualitas selama 2014 antara lain

1. Proses evaluasi penyusunan standar prosedur operasional
2. Reviu atas Laporan Keuangan Tahunan 2013 OJK sesuai dengan SAP dan SAK,
3. Reviu atas Laporan Keuangan Semesteran 2014 OJK sesuai dengan SAP dan SAK.
4. Pendampingan atas audit BPK



Independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kejelasan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sehingga pengelolaan OJK berjalan efektif.



Membuka diri terhadap hak pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi dan golongan, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah prinsip demokrasi.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung perkembangan pengetahuan dari karyawan OJK, pada November 2014 OJK meresmikan OJK Institute yang berada pada lantai 6 dan 7 gedung Merdeka. Kegiatan yang dilakukan di OJK Institute meliputi *Knowledge Center (learning center), Assessment Center, Talent Management Center, Research Center, Leadership and Financial Library, serta Financial Exhibition Museum*



Pengembangan Infrastruktur Logistik

Untuk mendukung fungsi pengawasan sektor jasa keuangan di daerah, OJK telah memiliki enam kantor operasional yang terpisah dengan kantor Bank Indonesia. Adapun kota-kota yang sudah memiliki kantor sendiri antara lain Kupang, Tegal, Purwokerto, Palangkaraya, Ambon dan Yogyakarta. Pada tahun 2015 OJK menargetkan memiliki kantor yang ada di seluruh provinsi Indonesia



Pengembangan Infrastruktur TI

Untuk mendukung OJK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, selama 2014 OJK telah mengembangkan infrastruktur pendukung baik aplikasi maupun pengembangan jaringan TI di Kantor Pusat maupun Kantor Regional dan Kantor OJK. Aplikasi yang dikembangkan antara lain :

- *Condensed Financial Statement* - Aplikasi laporan keuangan publikasi perbankan
- Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO)
- Sistem *Risk Based Supervision* (RBS) - IKNB
- Sistem Informasi Keuangan (SISKA)
- Sistem Informasi Audit Internal dan Manajemen Risiko (SI - AI)
- Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL)
- Sistem Informasi Rapat Dewan Komisioner (SI RDK)
- EPK/FCC *Wallboard*



HUBUNGAN KELEMBAGAAN DOMESTIK

Upaya mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, berkesinambungan, dan stabil, OJK telah melakukan 17 penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian maupun Lembaga Pemerintahan

1. Nota Kesepahaman Bersama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
2. Nota Kesepahaman Bersama dengan STIE Indonesia Banking School
3. Nota Kesepahaman Bersama dengan Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal
4. Nota Kesepahaman dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
5. Nota Kesepahaman dengan Universitas Teknologi Sumbawa
6. Nota Kesepahaman dengan Universitas Prof. Dr. Hamka
7. Nota Kesepahaman dengan Badan Intelijen Negara (BIN)
8. Nota Kesepahaman dengan Kementerian Lingkungan Hidup
9. Nota Kesepahaman Bersama dengan Mahkamah Agung dan BI
10. Nota Kesepahaman dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
11. Nota Kesepahaman Bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Dalam Negeri
12. Nota Kesepahaman dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
13. Nota Kesepahaman Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
14. Nota Kesepahaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
15. Nota kesepahaman dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
16. Nota kesepahaman antara OJK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
17. Nota kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)



Selama tahun 2014, OJK telah melakukan kerjasama dengan otoritas pengawas regulator Industri Jasa Keuangan maupun lembaga internasional lainnya, antara lain :

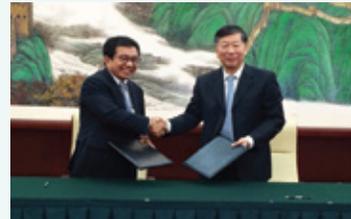
- a. Japan Financial Services Agency
- b. China Bank Regulatory Commission
- c. International Finance Corporation
- d. Dubai Financial Services Authority
- e. Bank Negara Malaysia (BNM)

OJK juga telah menjadi anggota dari berbagai *international standard setting bodies*, antara lain :

- a. The International Association of Insurance Supervisors (IAIS)
- b. International Organisation of Securities Commissions (IOSCO),
- c. The International Organisation of Pension Supervisors (IOPS)
- d. Islamic Financial Services Board (IFSB),
- e. International Network on Financial Education (INFE), dan Asean Insurance Training and Research Institute.
- f. FinCoNet (The International Financial Consumer Protection Organisation).

Untuk mendukung pengembangan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan, OJK mendapat bantuan berupa *Technical Assistance* dari berbagai regulator antara lain :

- a. Asian Development Bank (ADB) dalam penyusunan *Global Master Repurchase Agreement* dan *OJK Information Technology Infrastructure*
- b. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada area *Corporate Governance* dan *Financial Education and Customer Protection*



- c. International Finance Corporation (IFC) dalam penyusunan Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia
- d. International Monetary Fund (IMF) pada area *Anti Money Laundering* dan *Combating the Financing of Terrorism*
- e. Australia Securities and Investment Commission (ASIC) pada area *Risk based Supervision* dan statistik pada IKNB
- f. Australia Securities and Investment Commission (ASIC): pada area *Consumer Protection, Secondary Market Trading Surveillance, Alternative Trading System/Dark Pools, and Market Deepening*
- g. Australia Prudential Regulatory Authority (APRA) pada *Risk Based Supervision (RBS) Project*



KOMITE PENGEMBANGAN JASA KEUANGAN SYARIAH (KPJKS)



Pada tahun 2014, OJK membentuk Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses pengambilan kebijakan di bidang pengembangan jasa keuangan syariah serta mendukung sinkronisasi dan integrasi kebijakan strategis dan kebijakan operasional di bidang pengembangan jasa keuangan syariah. KPJKS dapat membantu OJK dalam memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa terkait jasa keuangan syariah, memberikan masukan terkait penerbitan fatwa baru dari DSN-MUI, dan memberikan masukan kepada pihak terkait dalam rangka perumusan kebijakan pengembangan industri jasa keuangan syariah.

KPJKS beranggotakan 24 orang, baik dari internal dan eksternal OJK dengan ketua komite adalah Ketua Dewan Komisiner OJK. Pihak eksternal dalam KPJKS terdiri dari anggota wakil *ex-officio* lembaga pemerintah dan non pemerintah dari Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bank Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (Dewan Syariah Nasional), dan lembaga terkait; serta tokoh, ulama dan akademisi yang mewakili unsur masyarakat dari berbagai disiplin keilmuan dan latar belakang keahlian.

Selama tahun 2014, KPJKS telah memberikan masukan dan pandangan terkait pengembangan sektor jasa keuangan syariah antara lain *grand strategy* dan *road map* Pengembangan Jasa Keuangan Syariah yang tengah dipersiapkan OJK. Dengan pandangan dan masukan KPJKS, diharapkan Indonesia dapat menjadi *focal point* bagi pengembangan Industri Jasa Keuangan syariah di tingkat regional, antara lain melalui koordinasi yang intensif dengan lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IDB).

Selain itu, disepakati pula mengenai perlunya strategi komunikasi dan sosialisasi Jasa Keuangan Syariah yang dilakukan secara intensif dan sistematis, khususnya untuk daerah dengan kondisi yang khas. Sejak dibentuknya KPJKS, berbagai kegiatan edukasi dan literasi keuangan syariah telah dilakukan diberbagai kota di seluruh Indonesia dengan melibatkan para anggota komite maupun tim kerja KPJKS.

X. ARAH STRATEGIS OJK 2015



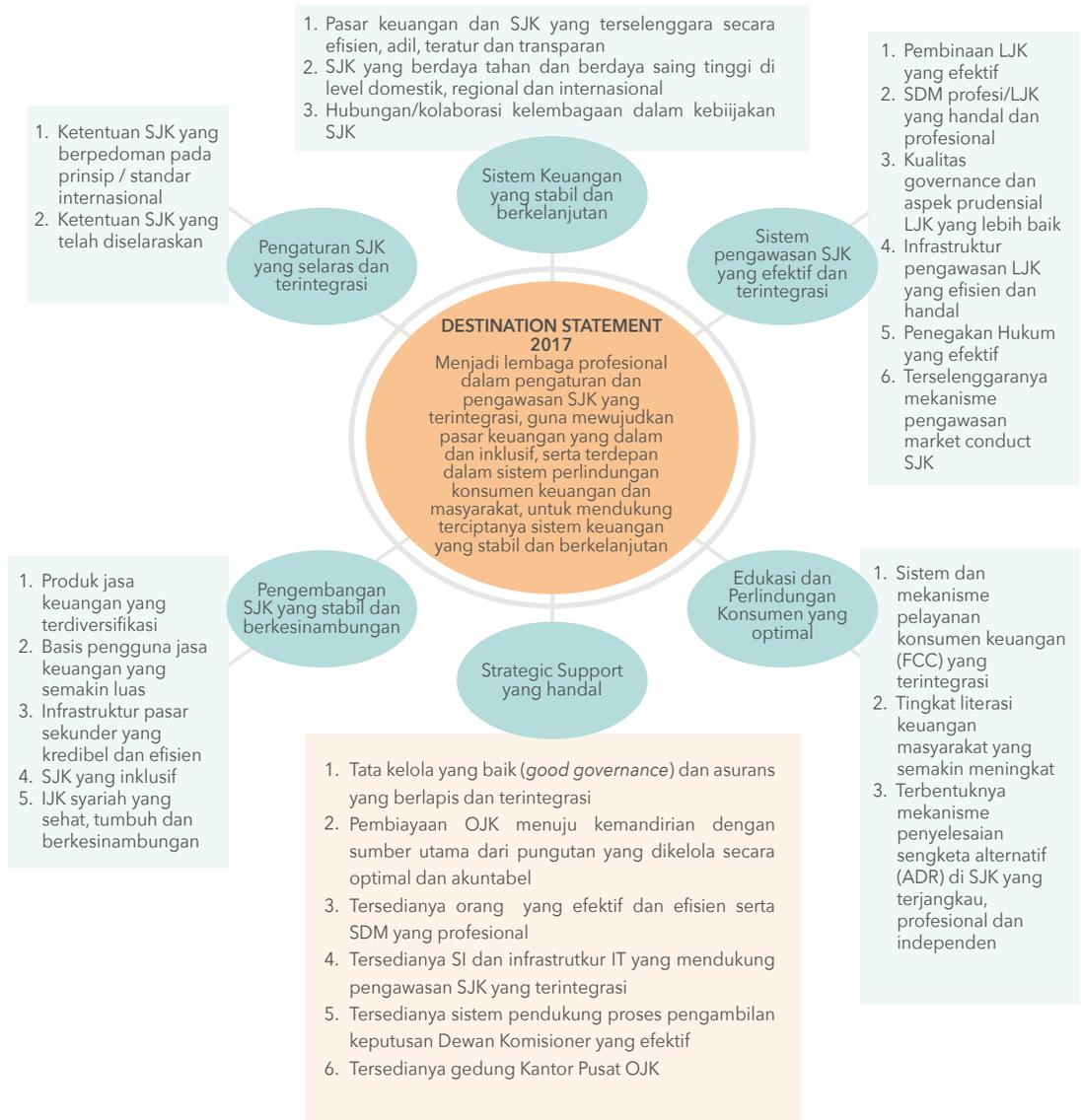
Halaman ini dengan sengaja dikosongkan

ARAH PENGEMBANGAN ORGANISASI OJK

OJK memiliki tiga tahap pengembangan organisasi yang mendukung pencapaian *Destination Statement* 2017 yaitu proses pembentukan fondasi organisasi, Integrasi dan Pengawasan lembaga keuangan, serta peran strategis OJK di level Regional dan International. Untuk mencapai hal tersebut, OJK telah menyusun *Strategy Map* 2015 yang terdiri atas 11 sasaran strategis



DESTINATION STATEMENT 2017



Stakeholder
Perspective

SS.1. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang tangguh, kontributif, dan Inklusif, Menjaga Sistem Keuangan yang Stabil dan Berkelanjutan, dan melindungi Kepentingan Konsumen dan Masyarakat

- IKU1.1. Indeks Kinerja SJK (Perbankan, PM dan IKNB) :
- 1.1.a Indeks Penetrasi SJK (PP : Intermediasi; PM : Jumlah Emiten/Perusahaan Publik dan Pertambahan Produk Pengelola Investasi; IKNB : Pertumbuhan Premi, Piutang, Aset Neto Dapen, Imbal Jasa Penjaminan)
 - 1.1.b Indeks Kesehatan SJK (PP : CAR; PM : MKBD & LKT-WTP; IKNB : RBC & Gearing Ratio)
- IKU1.2. Tingkat Pemahaman dan Kepuasan *Stakeholders* Terhadap Kinerja OJK

Internal Process
Perspective

SS.2. Meningkatkan Pengaturan SJK yang Selaras dan Terintegrasi

- IKU2.1 Ketentuan SJK yang Diselaraskan

SS.3. Mengembangkan SJK yang Stabil dan Berdaya Saing Global

- IKU3.1 Peningkatan Kedalaman Pasar Keuangan
IKU3.2 Ketahanan dan Daya Saing SJK Menghadapi MEA

SS.4 Mengoptimalkan Pengawasan SJK yang Terintegrasi dan Terkoordinasi Secara Efektif

- IKU4.1 Pelaksanaan Pengawasan SJK yang Terintegrasi
IKU4.2 Penanganan Kasus Dugaan Tindak Pidana SJK
IKU4.3 Penerapan Perizinan Prima

SS.5. Mengoptimalkan Edukasi & Perlindungan Konsumen

- IKU5.1 % Naik Indeks Inklusifitas Produk / Jasa Keuangan
IKU5.2 % Pembangunan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif di SJK
IKU5.3 % Penyelesaian Pengaduan Konsumen

SS.6. Meningkatkan *Surveillance* Sistem Keuangan & Koordinasi Secara Efektif

- IKU6.1 Tk. Kualitas Pelaksanaan *Surveillance* OJK Untuk Mendukung FKSSK
IKU6.2 Tk. Kualitas Pelaksanaan Manajemen Krisis OJK Untuk Mendukung FKSSK
IKU6.3 Tindak Lanjut Hasil Koordinasi BI dan Kemenkeu

SS.7 Mendorong Terwujudnya SJK Syariah Yang Sehat dan Bertumbuh

- IKU7.1 Indeks Kinerja SJK Syariah
IKU7.2 Tk. Pelaksanaan Kegiatan *Outreach* SJK Syariah

Strategic Support
Perspective

SS8. Meningkatkan tata kelola yang efektif

SS9. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan yang akuntabel

SS10. Meningkatkan organisasi yang terintegrasi, efisien dan efektif didukung SDM yang profesional

SS11. Mengembangkan sistem Informasi & sarana yang memadai

